

Ancaman Sampah Impor bagi Keamanan Manusia: Studi Kasus Desa Bangun dan Tropodo 2018-2019

Gresika Novaradila¹, Yusril Ihza Ali², Lila Afifa Astin³, Maria Indira Aryani⁴, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Hubungan Internasional,
⁵ Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

Email: gresika10@gmail.com, yusrilihzazaemon@gmail.com, lilaafifa123@gmail.com,
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id, aldira.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The National Sword Policy implemented by the Chinese Government in 2018 has a spillover effect in several countries in the Asian region, especially Indonesia. As one of the importers of recycled paper waste, Indonesia is faced with the problem of hazardous waste from abroad, which has increased by two percent in 2018. Besides, Indonesia also does not have good waste management, which exacerbates environmental damage and pollution. Some of them were experienced by Bangun and Tropodo Villages in East Java. The level of environmental pollution in Bangun and Tropodo Villages is quite high as a result of being used as a final disposal site for paper raw material waste mixed with foreign waste and hazardous toxic materials. As a result, environmental crises continue to occur and affect the quality of life of the people. This study analyzes the correlation between environmental crises which is directly proportional to the increasing threat to human security. The environmental crisis due to imported waste can turn into a security threat issue through the securitization process carried out by NGOs and the government. The author uses the concept of human security and securitization theory to see the causality relationship. In the end, the state is not only faced with traditional security problems that are territorial but problems of individual human security. Indonesia was forced to change several waste import policies.

Keywords: *Imported Waste, Environmental Crisis, Securitization, Human Security.*

Kebijakan National Sword Policy Pemerintah Tiongkok pada tahun 2018 memberikan efek spillover pada beberapa negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Sebagai salah satu importir sampah kertas daur ulang, Indonesia dihadapkan dengan masalah sampah bahan berbahaya dari luar negeri hingga terjadi peningkatan sebesar dua persen pada tahun 2018. Selain itu, Indonesia juga masih belum memiliki manajemen pengelolaan sampah yang baik sehingga memperparah pada kerusakan dan pencemaran lingkungan yang beberapa di antaranya dialami oleh Desa Bangun dan Tropodo di Jawa Timur. Tingkat pencemaran lingkungan Desa Bangun dan Tropodo cukup tinggi akibat dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir bagi sampah bahan baku kertas yang bercampur dengan sampah luar negeri dan bahan beracun berbahaya. Sebagai imbasnya, krisis lingkungan terus terjadi dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menganalisis korelasi antara krisis lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia. Krisis lingkungan akibat sampah impor dapat berubah menjadi isu ancaman keamanan melalui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh NGO dan pemerintah. Penulis menggunakan konsep keamanan manusia dan teori sekuritisasi untuk melihat hubungan kausalitas. Pada akhirnya, negara tidak hanya dihadapkan dengan masalah-masalah keamanan tradisional yang bersifat teritorial melainkan masalah keamanan manusia yang bersifat individu. Indonesia terpaksa mengubah beberapa kebijakan impor sampah.

Kata kunci: *Sampah Impor, Krisis Lingkungan Hidup, Sekuritisasi, Keamanan Manusia.*

Pendahuluan

Setelah Tiongkok menerapkan secara efektif kebijakan *National Sword Policy* pada Januari 2018, pergerakan sampah global mengalami perubahan dari yang semula menjadi negara destinasi hampir semua jenis skrap plastik dunia (GRID-Arendal 2019). Alasan pemberlakuan *National Sword Policy* adalah kesadaran pemerintah di Beijing terhadap dampak buruk bahan daur ulang terhadap air, tanah, udara, dan mulai mengancam nyawa (Richards 2019). Pemerintah Tiongkok mulai mengevaluasi kembali industri daur ulangnya, ditandai dengan pengumuman perubahan kebijakan terkait pembatasan impor daur ulang pada bulan Juli 2017. Kebijakan *National Sword Policy* secara langsung membuat banyak negara terpaksa mencari solusi alternatif dalam menangani sampah daur ulang. Calrecycle (2020) menyebutkan dampak dari kebijakan industri yang dibuat menyebabkan negara-negara yang sebelumnya mengeksport sampah daur ulang ke Tiongkok kemudian berpindah ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia sehingga menyebabkan peningkatan volume impor sampah yang signifikan.

Indonesia membutuhkan impor sampah sebagai bahan baku industri daur ulang karena bahan baku dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan industri. Kementerian Industri Republik Indonesia mencatat terdapat 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah menanamkan modal total Rp2,63 triliun sehingga menyerap tenaga kerja lebih dari 20.000 orang. Industri daur ulang plastik membutuhkan 5 juta ton plastik. Sedangkan sekitar 48 perusahaan *pulp* dan kertas dan 26 perusahaan berbahan baku 100% persen kertas memerlukan bahan baku mencapai 6,4 juta ton pertahun (Nik et. al. 2019). Setelah Tiongkok memberlakukan kebijakan *National Sword Policy*, terjadi kenaikan volume impor bahan baku daur ulang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), Indonesia mengalami kenaikan impor sampah dua kali lipat sebesar 283.000-ton pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2013 yang hanya 124.000 ton (Havid Vebri, Nina Dwiantika, Ragil Nugroho 2019). Kenaikan volume impor sampah juga disebabkan oleh longgarnya regulasi pemerintah dalam mengatur impor sampah Non bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 (Republik Indonesia 2016).

Praktik penyelundupan sampah B3 terutama sampah kertas di Indonesia juga marak pada tahun 2019 pada pelabuhan internasional di Jawa Timur. Terdapat 11 industri kertas yang melakukan impor sampah dan digunakan sebagai bahan baku. Sebanyak 9 perusahaan produksi dan daur ulang kertas di Jawa Timur menggunakan 4 juta ton kertas skrap per tahun sebagai bahan baku pembuatan kertas. Sekitar 63% kertas skrap berasal dari sumber lokal dan 37% diimpor sebanyak 1,5 juta ton. Sebelumnya bahan baku yang diimpor mengandung sekitar 2%-10% plastik skrap. Namun pada tiga tahun terakhir porsi skrap plastik yang terkandung pada impor tersebut mencapai 60-70%, mengakibatkan masalah krisis lingkungan hidup di Indonesia khususnya untuk masyarakat Jawa Timur (Jindrich Petrik. et al 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), lingkungan di Jawa Timur menunjukkan degradasi akibat sampah impor. Mulai pencemaran Sungai Brantas oleh mikroplastik atau potongan plastik B3 kurang dari 4,8 milimeter mengandung PCB penemuan telur ayam buras terkontaminasi racun dioksin, hingga banyak masyarakat Desa Tropodo mengidap ISPA akibat menghirup asap pembakaran sampah plastik (Ecoton 2019; Audi 2019). Memicu beberapa LSM termasuk ECOTON melakukan upaya peningkatan kesadaran lingkungan dengan berbagai cara, seperti publikasi dan pemberitaan melalui media dengan meliput keadaan dilapangan, hingga melakukan aksi demonstrasi ke pemerintah mendesak perbaikan regulasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat Jawa Timur.

Di Indonesia, dasar hukum impor sampah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2016. Secara teknis, kegiatan impor sampah diatur oleh kerja sama tiga instansi: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tugas dari Kemenperin dan KLHK adalah memberikan rekomendasi kepada importir terkait standar pengelolaan limbah, dan Kemendag berperan dalam mengatur secara rinci dan mengaudit impor sampah sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Sementara pada Permendag No. 31 tahun 2016 impor kertas tidak menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dan KLHK. Selain itu, impor kertas masuk dengan kode *green light* atau jalur hijau yang tidak memerlukan adanya pemeriksaan fisik. Di dalam kode jalur hijau, pengecekan cukup dengan meneliti dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Oleh karenanya banyak sampah plastik dan sampah B3 impor bisa masuk.

Masifnya penyelundupan sampah plastik dalam impor sampah kertas diakibatkan oleh lemahnya regulasi kegiatan impor kertas yakni Permendag No 31 Tahun 2016 yaitu *HS code* yang diperiksa oleh Bea-Cukai terdapat kata “dan lain-lain” yang merupakan campuran (Darmarjati 2019). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar turut membenarkan kelemahan dalam aspek regulasi, sehingga terdapat urgensi dalam merevisi Permendag terkait barang impor agar lebih spesifik lagi (Chandra 2019). Celah dalam Permendag No. 31 tahun 2016 juga memberi peluang pada penyelundupan komoditi lain. Bagaimana korelasi krisis lingkungan akibat sampah impor dengan ancaman keamanan manusia di Desa Bangun dan Desa Tropodo Jawa Timur Pada Tahun 2018-2019?

Tinjauan Pustaka

Menurut Lamont (2015), tinjauan pustaka penting karena dapat membantu memperjelas secara komprehensif celah yang diteliti dalam sebuah riset. Oleh karena itu, penulis menggunakan tiga pustaka dalam dari jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait korelasi krisis lingkungan akibat sampah impor terhadap keamanan manusia. Pustaka-pustaka yang ditampilkan membantu penulis dalam memperjelas hubungan kausalitas fenomena yang ditelaah dalam tulisan.

Pustaka pertama berasal dari Barnett (2013) dalam jurnal berjudul *Global environmental change and human security* yang menjelaskan sebab hubungan perubahan lingkungan dan keamanan manusia belum diprioritaskan dalam penelitian keamanan manusia dan agenda kebijakan. Dalam penelitian eksplanatif Barnett, konsep teori *environmental security* (keamanan lingkungan) dan *human security* (keamanan manusia) digunakan dan saling berkorelasi. Menurut Barnett, perubahan lingkungan diakibatkan industrialisasi, meningkatnya populasi dan konsumsi yang menyebabkan penurunan besar jumlah hutan primer, keanekaragaman hayati semakin berkurang, stok ikan makin menipis, degradasi lahan, polusi, kelangkaan air, degradasi pantai dan laut, pencemaran manusia, tanaman, dan hewan oleh bahan kimia dan zat radioaktif, perubahan iklim, serta kenaikan permukaan laut sebagai ancaman yang menyebabkan rasa tidak aman bagi manusia. Dalam jurnal, Barnett mengukur tendensi sikap agresif negara dan perselisihan antara kelompok-kelompok negara disebabkan karena berkurangnya lahan produktif.

Sedangkan konsep keamanan manusia merujuk pada hak kebutuhan dasar seperti akses ke makanan bergizi dan air minum bersih. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data sekunder dari beberapa penelitian tentang perubahan lingkungan global dan keamanan manusia, serta proyek Global Environmental Change and Human Security (GECHS). Kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tujuan keberlanjutan global tidak netral atau apolitis dan menantang banyak sistem dan struktur yang berkontribusi terhadap kerentanan dan ketidakamanan. Sedangkan proyek GECHS mengembangkan badan

pengetahuan, menunjukkan bahwa risiko keamanan yang timbul dari perubahan lingkungan tidak dapat dihindari dan lebih banyak didorong proses sosial daripada lingkungan.

Pustaka kedua berasal dari Jindrich et al. (2019) dalam laporan penelitian berjudul *Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia* yang menjelaskan konsekuensi pengelolaan sampah yang buruk dan regulasi perdagangan sampah plastik yang lemah. Teori yang digunakan mengenai lingkungan dan perdagangan global sampah. Penelitian Jindrich et. al. menggunakan metode kuantitatif dengan data primer meliputi uji tingkat pencemaran melalui jumlah kandungan telur ayam buras dan sekunder. Hasil penelitian dalam laporan adalah sampah plastik impor menyebabkan rantai makanan di Indonesia teracuni dari ditemukannya racun dioksin di dalam telur ayam akibat pembakaran sampah plastik impor.

Pustaka ketiga berasal dari Fuad (2020) dalam jurnal berjudul "*Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia: Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM*", membahas tanggung jawab negara dan korporasi terhadap kasus impor limbah plastik di Indonesia dalam sudut pandang Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Teori yang digunakan Fuad adalah prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM dengan metode penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan berasal dari peraturan UU, buku, artikel, jurnal, dan media. Penelitian Fuad berakhir pada kesimpulan bahwa negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional dan HAM ketika bekerja sama melalui kontrak atau mengatur sebuah perusahaan. Amandemen Konvensi Basel menjadi perangkat penting bagi negara-negara di belahan selatan agar menghentikan pembuangan limbah plastik yang tidak diinginkan negara-negara maju.

Pustaka-pustaka di atas berkontribusi dalam menjelaskan hubungan kausalitas dari variabel krisis lingkungan akibat sampah impor terhadap keamanan manusia. Selain itu membantu menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerusakan lingkungan terhadap keamanan manusia di masyarakat Desa Tropodo dan Desa Bangun. Sehingga menghasilkan sebuah pertanyaan penelitian yang mencoba menjawab korelasi antara krisis lingkungan akibat sampah impor dengan ancaman keamanan manusia di Desa Bangun dan Desa Tropodo Jawa Timur pada Tahun 2018-2019.

Kerangka Teori

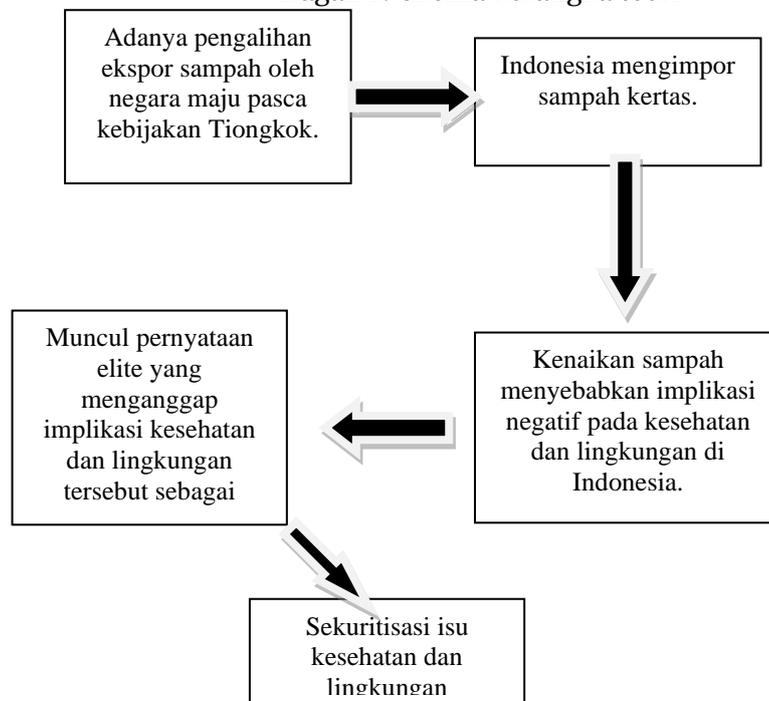
Konsep keamanan manusia berangkat dari pemikir mazhab Kopenhagen Barry Buzan (2008), sebagai respons dari pergeseran isu *state oriented* menjadi *people oriented*, atau yang semula militeristik menjadi semakin mencakup aspek-aspek non-tradisional seperti kerentanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, dan HAM. Konsep keamanan manusia kemudian mencakup dimensi-dimensi dari keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, keamanan pangan, dan keamanan kesehatan.

Mengingat masalah lingkungan mengancam keamanan, maka penulis juga menggunakan teori *securitization* atau sekuritisasi yang dikemukakan Barry Buzan et. al. (1998) yang mengidentifikasi isu politik dan non-politik ke dalam isu keamanan. Waever (1998) berpendapat bahwa masalah keamanan muncul ketika *elite* memberikan pernyataan dan membenarkan. Dan sekuritisasi berlangsung ketika masalah diterima oleh para audiensi (Stone 2009). Meski aktor yang melakukan sekuritisasi pada umumnya didominasi negara, namun tidak menutup kemungkinan aktor lain seperti organisasi non-pemerintah atau LSM dan masyarakat dapat melakukan sekuritisasi. Dalam mazhab Kopenhagen, pernyataan mengenai keamanan dapat menjadikan segala isu tergolong isu keamanan. Sehingga dalam menghindari perluasan, klaim sekuritisasi dikualifikasikan dalam dua hal. Pertama, sekuritisasi adalah fenomena kolektif atau merupakan suatu bentuk praksis sosial tertentu

dan yang kedua, sekuritisasi harus memiliki spesifik struktur retrorika dan aturan tertentu (Barry Buzan et. al. 1998; Trombetta, M.J. 2006).

Berdasarkan mazhab Kopenhagen, apa yang terjadi di Desa Tropodo dan Desa Bangun dapat diklasifikasikan menjadi isu keamanan manusia diakibatkan kerusakan lingkungan akibat sampah impor yang dapat diukur dari dampak sampah impor terhadap lingkungan dan ancaman kerusakan lingkungan terhadap manusia. Beberapa di antaranya seperti tercemarnya sumber air, makanan beracun, asap pekat pembakaran, dan gangguan kesehatan. Sesuai teori sekuritisasi Barry Buzan et. al. (1998), masalah kerusakan lingkungan dapat dianggap sebagai masalah keamanan manusia pada saat terdapat aktor yang mengidentifikasi suatu isu sebagai isu keamanan. Adapun aktor yang bereperan dalam kasus di Desa Tropodo dan Desa Bangun adalah sejumlah LSM, pemerintah, dan komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian pada lingkungan sehingga sekuritisasi menjadi fenomena kolektif. Untuk mempermudah bagaimana isu krisis lingkungan dan kesehatan di Desa Bangun dan Desa Tropodo dapat menjadi sebuah isu keamanan, berikut skema dirumuskan.

Bagan 1: Skema kerangka teori



Sumber: analisis penulis

Terdapat bukti yang menjustifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan di kedua desa adalah sampah impor, yakni fakta bahwa masyarakat Desa Bangun dan Desa Tropodo mendapatkan dan mengolah sampah. Desa Bangun mendapatkan sampah dari beberapa pabrik kertas yang mengimpor bahan baku, mengakibatkan masyarakat terdesak untuk beralih profesi dari petani padi menjadi “petani” plastik karena penghasilan yang didapatkan dari menyortir sampah plastik pabrik kertas lebih banyak ketimbang pendapatan bertani (Ecoton 2019). Sebagai imbas dari peralihan profesi di Desa Bangun, limbah sampah plastik dari Desa Bangun mendesak pabrik-pabrik penghasil tahu di Desa Tropodo mengalihkan bahan bakar dari kayu ke sampah plastik. Karena secara harga, sampah plastik lebih murah dari kayu.

Penelitian menganalisis korelasi antara krisis lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia. Krisis lingkungan akibat sampah impor berubah menjadi isu yang mengancam keamanan melalui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui korelasi antara krisis lingkungan hidup akibat sampah impor terhadap keamanan manusia antara lain: (1) krisis lingkungan yang ditimbulkan sampah impor; dan (2) ancaman keamanan manusia yang muncul akibat krisis lingkungan yang ditimbulkan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan riset kepustakaan. Tujuan penulis menggunakan metode kualitatif adalah: (1) mengetahui pengaruh sampah impor dapat menyebabkan krisis lingkungan; (2) mengetahui pengaruh krisis lingkungan dapat mengancam keamanan manusia di Desa Tropodo dan Desa Bangun, (3) dan mengetahui proses sekuritisasi atas masalah lingkungan oleh LSM dan pemerintah. Data sekunder yang diambil berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, media masa, koran, dan data-data hasil penelitian yang dipublikasikan LSM ECOTON dan GAIA mengenai krisis lingkungan yang terjadi di Desa Tropodo dan Desa Bangun. Penelitian berjenis eksplanatif atau eksplanatori yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel yang saling berpengaruh dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Singarimbun & Effendy 1995; Umar 1999). Sedangkan penelitian ini menganalisis hubungan antara krisis lingkungan akibat sampah impor dengan keamanan manusia.

Temuan dan Pembahasan

Sampah Impor Menyebabkan Krisis Lingkungan

Penyulundupan sampah B3 yang tidak dapat daur ulang oleh industri dalam impor sampah menyebabkan krisis lingkungan di Desa Bangun dan Tropodo Jawa Timur. Sejumlah industri kertas di Desa Bangun dan Tropodo mengimpor sampah kertas yang sebanyak 40% telah tersusupi sampah plastik (Suwandi 2019). Bahan baku yang diimpor industri daur ulang seperti kertas bekas dan *scrap* atau plastik sisa sebagian besar tidak bersih akibat kontaminasi limbah B3. Praktik pelimpahan sampah B3 juga terjadi pada masyarakat Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo yang menyebabkan adanya pencemaran tanah, air, dan udara.

Sementara kontaminasi banyak terjadi pada impor sampah kertas bekas, yang dibuktikan dari sejumlah temuan seperti kasus pada tanggal 9 Juli 2019 di mana Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya menahan delapan kontainer berisi kertas bekas yang terkontaminasi sampah rumah tangga dan bahan berbahaya dari Australia (Puspitasari 2019; Koran Tempo 2019). Ditambah lagi, sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2019, terdapat keseluruhan 49 kontainer yang dikembalikan ke negara asal akibat kontaminasi sampah dan limbah B3 (MediaIndonesia 2019). Penemuan kontainer yang tercampur sampah B3 terjadi sesaat setelah Tiongkok menerapkan secara penuh kebijakan National Sword Policy pada tahun 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade) menyebutkan volume impor sampah Indonesia meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dari yang semula 124.000 ton pada tahun 2013 menjadi 283.000 ton pada tahun 2018 (Havid et al. 2019). Kenaikan volume sampah sebagian besar karena terjadi penyelundupan sampah plastik ke dalam impor kertas bekas masuk Indonesia akibat digolongkan dalam kode jalur hijau. Sehingga menyisakan persoalan besar berupa akumulasi peningkatan tumpukan sampah plastik dan B3 yang sulit untuk didaur ulang.

Di Jawa Timur, terdapat 11 industri kertas yang melakukan impor sampah kertas bekas sebagai bahan baku, antara lain PT Adiprima Suryaprinta, PT Ekamas Foruna, PT Jaya Kertas, PT Megasurya Eratama, PT Mekabox Internasional, PT Mekabox Surabaya, PT Mount Dream, PT Pakerin, PT Suparma, PT Surya Pemenang, dan PT Tjiwi Kimia. Sekitar 63% kertas skrap didapatkan dari sumber lokal, sedangkan 37% atau sebanyak 1,5 juta ton kertas skrap diimpor. Sebelumnya bahan baku yang diimpor terkontaminasi sekitar 2 hingga 10% plastik skrap. Namun pada tiga tahun terakhir, porsi skrap plastik yang mengontaminasi impor mencapai 60 sampai dengan 70% (Jindrich 2019). Tingkat penyelundupan sampah plastik ke dalam impor sampah kertas yang tinggi menunjukkan peningkatan terhadap tendensi kerusakan lingkungan.

Tabel 1: Jumlah dan bentuk mikroplastik dari 12 industri kertas.

Paper Industry	Average Abundance of Microplastic (Particle/100 L)				Totals of Microplastic (Particle/100 L)
	Fiber	Fragment	Film/Filament	Other	
1. Sun Paper	78	108	124	16	326
2. Dayasa Arya Prima	92	118	45	4	259
3. Surya Pamenang	198	56	12	2	268
4. Jaya Kertas	148	330	24	14	516
5. Tjiwi Kimia Tbk	72	51	24	0	147
6. Surabaya Mekabox	43	544	72	16	675
7. Mount Dream Indonesia	61	280	23	0	364
8. Adiprima Surya Printa	23	292	88	0	403
9. Mekabox International	178	42	3896	16	4132
10. Eratama Megasurya	27	114	124	12	251
11. Suparma	17	136	68	20	241
12. Pakerin Tbk	156	2048	880	128	3212

Sumber: *Research and Education Program Ecoton(2019)*

Sampah plastik berbahaya bagi lingkungan. Berdasarkan audit merek yang dilakukan ECOTON, terdapat 3 jenis sampah rumah tangga yang ditemukan di impor kertas bekas. Antara lain: (1) *household* seperti detergen, pakaian, sepatu, tisu, CD bekas; (2) *personal care* seperti pasta gigi, *face wash*, dan obat-obatan; (3) *food packaging* seperti kaleng bekas minuman, bungkus makanan, dan botol bekas minuman. Semua jenis sampah impor berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan karena merupakan sampah plastik, residu, dan B3. Menurut laporan penelitian berjudul *Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia* oleh aliansi organisasi lingkungan hidup lintas negara seperti IPEN, Nexus 3, Arnika Association, dan ECOTON (2019), sampah plastik merupakan ancaman kimiawi karena sebagian besar plastik yang digunakan mengandung bahan-bahan kimia bersifat racun. Lebih dari 4.000 zat kimia telah diidentifikasi dan ditemukan dalam kemasan plastik atau digunakan dalam proses manufaktur, sedangkan 148 di antaranya merupakan B3 (Jindrich 2019).

Krisis lingkungan yang ditimbulkan sampah impor mencemari air sungai. Sebanyak 11 industri kertas daur ulang yang ada di Jawa Timur membuang limbahnya ke Sungai Brantas yang merupakan sumber air minum dan habitat ikan air tawar. Berdasarkan penelitian ICH (2019), pada bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019 dari 7 lokasi di Hilir Brantas dan Kali Surabaya, ditemukan partikel mikroplastik terkandung dalam air sebanyak 293 sampai dengan 2.499 partikel/liter dan di saluran pembuangan 11 industri kertas daur ulang ditemukan 3.896 partikel per liter. Penemuan partikel mikroplastik mengindikasikan pencemaran air di Sungai Brantas. Penelitian lain yang dilakukan Ecoton juga menyebutkan sekitar 80% ikan yang hidup di sungai Brantas mengandung mikroplastik dalam lambung (Surabaya.tribunnews 2018). Konsumsi mikroplastik dapat mengganggu kematangan *gonad* atau kelenjar reproduksi ikan jantan dan melemahkan sel telur ikan betina sehingga

mengurangi populasi ikan air tawar. Kedua, sampah impor menyebabkan pencemaran mikroplastik pada air dan tanah yang mengakibatkan penurunan kualitas air tanah (Alamsyah 2019). Ketiga, pencemaran udara dari pembakaran plastik yang mengeluarkan zat dioksin yang beracun.

Krisis lingkungan terlihat di Desa Bangun dan Tropodo karena menerima limpahan sampah impor yang sukar diaur ulang. Sampah impor di kedua desa berasal dari pabrik kertas daur ulang yang membuang dan menjual sampah plastik yang tidak dapat diolah kepada para makelar, pendaur ulang kecil, atau disumbangkan kepada komunitas sebagai bagian dari program pengembangan komunitas dari pabrik kertas (Jindrich 2019). Sedangkan tempat akhir dari plastik berkualitas rendah adalah di *open dumps* atau tempat penimbunan terbuka, pabrik tahu, dan pabrik kapur tempat masyarakat menggunakan plastik sebagai bahan bakar. Industri telah membuang dan menjual sampah plastik ke warga Desa Bangun dengan harga mulai dari 100 hingga 400 ribu per truk (Hadi 2019; Koran Tempo 2019). Sampah dianggap ladang penghasilan karena secara tidak langsung mendesak warga Desa Bangun beralih profesi dari petani padi menjadi “petani” plastik. Plastik yang dibeli kemudian disortir kembali berdasarkan jenis-jenis yang telah ditentukan dan dijual kembali ke industri daur ulang plastik. Sampah-sampah juga dijemur dan ditimbun oleh warga Desa Bangun atau dibakar untuk mengurangi volume.

Terdapat 50 pabrik tahu di Desa Tropodo yang membakar residu plastik yang tidak dapat diolah di Desa Bangun sebagai bahan bakar tungku pembuatan tahu. Namun, asap yang dikeluarkan pekat dan beracun (Salman, Ghinan & Rosiana Haryanti 2019). Abu dan debu pembakaran juga menyebabkan pencemaran tanah yang mengandung 16 jenis racun. Pada telur ayam non-ras yang dilepas-liarkan di Desa Tropodo, kandungan racun dioksin pada telur disebabkan karena ayam-ayam mematok makanan di tanah yang telah tercemar plastik dan debu residu pembakaran plastik (Jindrich 2019). Temuan yang sama juga dijumpai di Desa Bangun.

Tabel 2: komparasi racun pada telur ayam di Desa Bangun dan Desa Tropodo.

Desa Bangun	Desa Tropodo
Telur ayam mengandung dioksin 10,8 pg TEQ g-1 lemak, empat kali lebih tinggi dari batas aman yang telah ditetapkan Uni Eropa.	Tingkat dioksin tertinggi kedua dalam telur ayam dari Asia yang pernah diukur ditemukan dalam sampel yang dikumpulkan di dekat pabrik tahu di Tropodo. Tingkat dioksin dalam telur ayam mencapai 200 pg TEQ g-1 lemak, hampir sama dengan tingkat dioksin tertinggi dalam telur di Bien Hoa, Vietnam, bekas pangkalan udara Amerika Serikat.
Telur ayam mengandung zat kimia penghambat nyala dalam plastik, seperti <i>short-chain chlorinated paraffins</i> (SCCPs) dan terkontaminasi <i>perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	Telur ayam mengandung zat kimia penghambat nyala plastik SCCPs dan <i>polybrominated diphenyl ethers</i> (PBDEs).

Sumber: Koran Tempo (2019)

Krisis Lingkungan Mengancam Kesehatan Manusia (Masyarakat Desa Tropodo dan Desa Bangun)

Perubahan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara menjadi salah satu ancaman atau krisis yang menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat Desa Bangun dan

Tropodo. Bahaya bagi masyarakat terlihat dari kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Sumber air minum dari Sungai Brantas maupun air tanah dari sumur sudah tercemar mikroplastik dan ikan-ikan yang ditangkap dari sungai mengandung mikroplastik. Menurut laporan penelitian Azoulay et al. (2019) apabila mikroplastik dikonsumsi manusia, sejumlah penyakit berbahaya dapat timbul seperti: (1) peradangan yang terkait kanker, penyakit jantung, penyakit radang usus, *arthritis reumatoid*; (2) penyakit kronis seperti *arterosklerosis*, kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular; (3) *genotoksitas* atau kerusakan yang menyebabkan mutasi yang memicu kanker dan penyakit *autoimun*. Bukti manusia telah mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung mikroplastik dapat dilihat dari penelitian Ecoton (2019) yang menemukan mikroplastik pada feses manusia. Penelitian dilakukan dengan sampel feses relawan yang tinggal di tepian Sungai Brantas pada wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Trenggalek, Pasuruan, Kediri, dan Malang.

Tabel 3: Jenis mikroplastik pada feses relawan

Domicile Volunteers	Numbers of Volunteers	Average Abundance of Microplastic (Particle/10 grams)			
		Fiber	Fragment	Film/Filament	Granular/Scrub
1. Surabaya	8	2 - 26	5 - 31	3 - 14	1 - 45
2. Gresik	9	2 - 35	8 - 29	1 - 21	1 - 36
3. Sidoarjo	1	5	9	1	12
4. Mojokerto	3	2 - 9	1 - 7	0	1 - 5
5. Jombang	4	1 - 8	2 - 8	0	0
6. Trenggalek	1	8	11	4	24
7. Pasuruan	1	7	12	9	4
8. Kediri	5	9 - 18	8 - 23	1 - 7	2 - 5
9. Malang	3	7 - 20	7 - 23	2 - 8	1 - 2

Sumber: *Research and Education Program Ecoton* (2019)

Sedangkan pencemaran udara akibat pembakaran sampah plastik di Desa Tropodo untuk bahan bakar pembuatan tahu menyebabkan berbagai macam racun seperti karbon monoksida, furans, merkuri, dan dioksin lepas ke udara (ECOTON & Nexus 3 2019). Bahaya kesehatan yang disebabkan dari pembakaran dapat merusak sistem saraf, mengganggu sistem endokrin, memicu hormon tidak seimbang, mengganggu sistem reproduksi, memutasi DNA pencetus kanker, dan mengganggu sistem kekebalan tubuh (Aliansi Zero Waste 2019). Studi tentang hubungan pencemaran lingkungan karena dioksin dengan kasus-kasus kanker menilik dari pengalaman di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Menurut hasil uji pemerintah daerah terkait indeks kualitas lingkungan hidup di Sidoarjo pada tahun 2018, kadar emisi udara di Desa Tropodo melampaui ambang batas (Hadi 2019). Asap pekat dari pembakaran plastik menyebabkan banyak anak kecil terserang penyakit, dan ISPA. Selain itu Puskesmas Krian mencatat sejumlah penyakit yang banyak diidap oleh warga Desa Tropodo meliputi *myalgia*, *hipertensi*, diabetes, ispa, *gastritis*, *cephalgia*, diare, sakit gigi, asma, dermatitis (DetikNews.com 2019; Koran Tempo 2019).

Masyarakat Desa Bangun dan Tropodo juga dihadapkan dengan ancaman dari mengonsumsi telur dengan kandungan racun dioksin. Yang apabila dikonsumsi oleh orang dewasa maka dapat melebihi batas toleransi dioksin terklorinasi harian oleh European Food Safety Authority (EFSA) sebanyak 70 kali lipat. Penelitian epidemiologi mengungkapkan dampak dioksin terklorinasi mengakibatkan penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, *porfiria*, *endometriosis*, *menopause* dini, perubahan hormon testosteron dan tiroid, serta mengubah respons sistem kekebalan tubuh (Jindrach 2019). Selain itu, telur ayam di Desa Bangun terkontaminasi oleh PFOS dengan tingkat konsentrasi setara dengan kawasan industri di Eropa. Jika telur dikonsumsi oleh orang dewasa dengan porsi satu telur per

minggu, maka asupan melebihi batas toleransi PFOS mingguan EFSA sebanyak 1,3 kali lipat. PFOS dapat menyebabkan kanker, kematian neonatal, keterlambatan perkembangan fisik, dan gangguan endokrin berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hewan. Sementara telur dari Desa Bangun dan Tropodo juga mengandung SCCPs yang bersifat racun, mengganggu fungsi endokrin, dan penyebab kanker serta PBDEs yang mengakibatkan dampak terhadap kesehatan reproduksi serta pada perkembangan tubuh dan *neurotoksik*.

Sekuritisasi di Desa Bangun dan Tropodo

Melihat krisis lingkungan akibat sampah impor yang mencuat ke publik dan mengalami proses sekuritisasi, akhirnya elite dari LSM lingkungan seperti ECOTON, Walhi, AZWI, dan BaliFokus atau Nexus3 menunjukkan kepedulian pada masyarakat (Maskur 2019). LSM-LSM melakukan berbagai penelitian dan menyuarakan temuan untuk meyakinkan para elite pemerintah seperti Menteri LHK dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah B3 KLHK bahwa permasalahan lingkungan adalah isu yang mengancam keamanan masyarakat Indonesia melalui degradasi kesehatan akibat lingkungan hidup yang rusak. Kerusakan lingkungan terjadi akibat konsekuensi peningkatan sampah impor masuk ke Indonesia dan turut dipengaruhi kinerja manajemen sampah yang buruk dan peningkatan produksi sampah domestik.

Mengutip Beck (1994) menganalisis sekuritisasi dalam masalah lingkungan bukan lagi menjadi aturan yang diarahkan, melainkan mengubah aturan tergolong sekuritisasi refleksif karena cenderung pada perilaku manusia untuk mengamankan lingkungan. Sehingga dalam sekuritisasi yang dilakukan elite dalam isu krisis lingkungan akibat sampah impor menyebabkan pemerintah terdesak untuk mengubah dan memperketat kebijakan terkait impor sampah, dibuktikan dari adanya revisi peraturan pada Permendag No. 31 Tahun 2016 menjadi Permendag No. 84 Tahun 2019. Justifikasi sekuritisasi berasal dari landasan perubahan regulasi yang secara garis besar berisi tentang sikap pemerintah yang tetap ingin memenuhi bahan baku industri daur ulang di Indonesia. Sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan dan kesehatan yang disebabkan naiknya intensitas sampah impor yang masuk ke Indonesia pasca kebijakan Tiongkok di tahun 2018.

Meski pada akhirnya pemerintah Indonesia melalui Kemendag dan instansi terkait melakukan sekuritisasi pada sektor kesehatan dan lingkungan akibat efek kebijakan Tiongkok di tahun 2018, isu sampah impor mencuat ke publik dan memaksa *elite* pemerintah untuk mendorong kontribusi dari elite lain dari LSM lingkungan. Justifikasi studi kasus telah memenuhi indikator dari konsep/teori sekuritisasi oleh Barry Buzan dengan catatan inisiator bukan dari pihak pemerintah, melainkan dari masyarakat. Penciptaan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia mencerminkan upaya sekuritisasi kesehatan dan lingkungan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, karena masyarakat tidak memiliki legitimasi untuk secara langsung terlibat dalam sebuah proses penciptaan kebijakan.

Grafik 1.1 Dasar Pertimbangan Permendag No. 84 Tahun 2019



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2019)

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan LSM dan masyarakat pada kasus yang terjadi pada Desa Bangun dan Tropodo dapat memicu sebuah kebijakan yang mencerminkan upaya sekuritisasi kesehatan dan lingkungan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan penelitian sebagai pemicu pembahasan ke tataran lebih luas. Pemerintah Indonesia melalui Kemendag dan instansi terkait melakukan sekuritisasi pada sektor kesehatan dan lingkungan. Sekuritisasi yang dilakukan pemerintah merupakan respons dari pengalihan ekspor sampah oleh negara maju akibat kebijakan National Sword Policy Tiongkok pada tahun 2018. Negara-negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak akan pengalihan ekspor sampah karena menjadi pengimpor sampah demi mencukupi kebutuhan industri dalam negeri. Akibat tata kelola sampah di Indonesia yang masih belum baik, pengalihan ekspor sampah oleh negara maju menyebabkan volume impor sampah bertambah yang berpotensi menimbulkan kasus-kasus penyelundupan sampah B3. Sehingga menyebabkan krisis lingkungan dan kesehatan yang merupakan bagian dari konsep keamanan manusia Barry Buzan.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Ibu Adiasri Putri Purbatina, Ph.D. yang telah memberikan masukan pada penulis dalam menggunakan metode riset hubungan internasional secara baik dan tepat.

Referensi

Artikel Jurnal Ilmiah

Barnett, J. M. (2013). Global environmental change and human security. *Annual reviews* , pp. 355-361.

- Beck, Ulrich. 2006. *Living in the World Risk Society*. Economy and Society 35.3 : 329-45.
- Buzan, B., 2008. *People, States & Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era*. Ecpr Press.
- Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O. and De Wilde, J., 1998. *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- ECOTON & Nexus 3. 2019. Bahan Kimia Beracun yang Dilepaskan Oleh Pembakaran Plastik.
- Effendy, Onong Uchjana, 1995. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fuad, M. B. 2020. Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM). In *Fulbright Alumni Association of Nigeria 10th Anniversary Conference Development, Environment and Climate Change: Challenges for Nigeria, University of Ibadan*
- Husein, Umar, 1999. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta: PT Gramedia
- Pustaka Utama, ICH. 2019. Kandungan Mikroplastik Diminta Diperketat. hal. 10.
- Lamont, C. 2015. *Research Methods in International Relations*. London: Sage Publication Ltd.
- Luthan, S., 2016. Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup. *UNISIA*, (30), pp.100-111.
- Maya Ayu Puspitasari, 2019. *Ratusan Kontainer Tercampur Limbah, Contoh Kasus*, (KORAN TEMPO, 19 November 2019), hal. 28.
- Trombetta, M.J., 2006. *The securitization of the environment and the transformation of security*. In *Standing Group on International Relations Conference, Turin* (pp. 1-22).

Artikel Majalah atau Koran

- Havid Vebri, Nina Dwiantika, Ragil Nugroho. 2019. *Negeri Darurat Sampah Impor*, (Kontan, 5 Agustus-11 Agustus 2019). Hal 28.
- Media Indonesia. 2019. Tegas Tolak Sampah Impor. hal. 2.
- NIK/MEL/BAY/CAS/ICH. 2019. "Sampah Impor" Jejal Pemukiman, (KOMPAS, 16 Juli 2019), hal 11.
- Nur Hadi. 2019. *Warga Tropodo Banyak yang Terjangkiti ISPA*, (Koran Tempo, 18 November 2019), hal. 5.

Sumber Elektronik

- Alamsyah, Ichsan E. 2019. Negeri Impor Sampah. Daring. Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/retizen/surat-pembaca/19/07/03/pu266h349-negeri-impor-sampah>. Diakses pada tanggal 30 April 2020.

- Audi, Gilas. 2019. Bahaya Besar Plastik Kecil. Daring. Diakses di <https://jatimnet.com/bahaya-besar-plastik-kecil>. Diakses pada tanggal 30 April 2020.
- Azoulay, D., et al. 2019. *Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet*. Daring. Diakses di <https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/Plastic-and-Health-The-Hidden-Costs-of-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020.
- CalRecycle. 2020. *International Policies Affecting Global Commodity Markets*. Daring. Diakses di <https://www.calrecycle.ca.gov/markets/nationalsword/globalpolicies>. Diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Chandra, Ardan. A.. 2019. Sampah Plastik “diimpor” ke RI, Menteri LHK: Ada yang Longgar. Daring. Diakses di <https://finance.detik.com/energi/d-4529375/sampah-plastik-diimpor-ke-ri-menteri-lhk-ada-yang-longgar>. Diakses pada tanggal 18 April 2020.
- Darmarjati, D. 2019. Australia Buka Suara Isu Penyelundupan Sampah Plastik ke Indonesia. Daring. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4529534/australia-buka-suara-soal-isu-penyelundupan-sampah-plastik-ke-indonesia>. Diakses pada tanggal 18 April 2020.
- DetikNews.com. 2019. Pabrik Tahu yang Gunakan Sampah Plastik Impor Bikin Warga Sakit ISPA. Daring. Diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4797305/pabrik-tahu-yang-gunakan-sampah-plastik-impor-bikin-warga-sakit-isp>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2020
- Ecoton. 2020. Daring. Diakses di <http://ecoton.or.id/berita/>. Diakses pada tanggal 19 April 2020
- GAIA. 2019. Discarded Communities on The Frontline of The Global Plastic Crisis. Daring. wastetradeories.org: <https://wastetradeories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf>. Diakses 21 Februari 2020.
- GRID-Arendal. 2019. Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste (GRID-Arendal Policy Brief). Retrieved from https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/483/original/PlasticBrief_hi.pdf?1557746817 . Diakses 1 Maret 2020.
- Hadi, Nur. 2019. Bisnis Limbah Plastik di Desa Bangun. Daring. Diakses di <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/447658/bisnis-limbah-plastik-di-desa-bangun?>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.
- Hadi, Nur. 2019. Pemerintah Daerah Tak Berdaya Atasi Pencemaran. Daring. Diakses di <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/447659/pemerintah-daerah-tak-berdaya-atasi-pencemaran>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.
- Higgs, Micaela .M.. 2019. *America’s new recycling crisis, explained by an expert*. Daring. Diakses di <https://www.vox.com/the-goods/2019/4/2/18290956/recycling-crisis-china-plastic-operation-national-sword>. Diakses pada tanggal 18 April 2020.

- Jindrich Petrlik, et al. 2019. *Report Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia*. Dari IPEN.org: https://ipen.org/sites/default/files/documents/indonesia-egg-report-v1_8-id-web.pdf
- Maskur, F. 2019. Azwi Serukan Setop Impor Sampah Plastik, Ikuti Negara di Asean. Retrieved October 10, 2020, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190625/257/937646/azwi-serukan-setop-impor-sampah-plastik-ikuti-negara-di-asean>
- Richards, S. 2019. The Reasons Behind The National Sword. Daring. Diakses di <https://www.buschsystems.com/resource-center/page/the-reasons-behind-the-national-sword>. Diakses pada tanggal 19 April 2020.
- Salman, Ghinan & Rosiana Haryanti. 2019. Dilema Pabrik Tahu Gunakan Limbah Plastik untuk Produksi Biaya Murah, tapi Dianggap “Racuni” Indonesia. Daring. Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2019/11/28/06160021/dilema-pabrik-tahu-gunakan-limbah-plastik-untuk-produksi-biaya-murah-tapi?page=1>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020
- Surabaya Tribunnews. 2018. 80 Persen Perut Ikan di Sungai Brantas Mengandung Mikroplastik dan Mikro Fiber. Daring. Diakses di <https://surabaya.tribunnews.com/2018/07/31/80-persen-perut-ikan-di-sungai-brantas-mengandung-mikroplastik-dan-mikro-fiber>. Diakses pada tanggal 30 April 2020.
- Suwandi, Cikwan. 2019. Pemerintah Harus Ubah Status Impor Sampah Kertas. Daring. Diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/248908-pemerintah-harus-ubah-status-impor-sampah-kertas>. Diakses pada tanggal 30 April 2020.
- <https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-Covid-19-pandemi> [diakses 8 Juli 2020].